



USAID
DARI KAKYAT AMERIKA



Internews
Local voices. Global change.

INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2022



Aliansi Jurnalis Independen
2022



INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2022



**Aliansi Jurnalis Independen
2022**

Buku ini terlaksana atas dukungan rakyat Amerika Serikat melalui USAID. Isinya adalah tanggung jawab AJI dan tidak mencerminkan pandangan Internews, USAID atau pemerintah Amerika Serikat.





INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2022

**Bambang Muryanto
Erick Tanjung**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

2022

TIM PENYUSUN
INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2022

Desain Riset : Muhamad Heychael
Penulis : Bambang Muryanto dan Erick Tanjung
Editor : Nursyawal
Tata Letak & Perancang Sampul : Fahrul Rozi

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindah sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diterbitkan pertama kali oleh:



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 2022
Jl. Tebet Timur Dalam I No.25, RW.4, Tebet Timur,
Kec. Tebet, Jakarta 12820
Telp. +62 21 22908458. Fax 3151261
Email: sekretariat@ajindonesia.or.id
Web: www.aji.or.id

INDEKS KESELAMATAN JURNALIS 2022

76 hlm. : 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-979-3530-61-1

Cet. I, Oktober 2022

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

Didukung oleh:



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



DAFTAR ISI

Daftar Grafis 5

Kata Pengantar AJI 6

Kata Pengantar Internews 8

Indeks Keselamatan Jurnalis 10

 1. Pengantar 10

 Latar Belakang 10

 Maksud dan Tujuan 11

 2. Metodologi 12

 3. Hasil Riset 14

 3.1 Profil Responden 14

 3.2 Pengalaman Liputan Berisiko 16

 3.3 Jenis Liputan Berisiko 19

 3.4 Protokol Keamanan dalam Liputan Berisiko 24

 3.4.1 Keamanan Digital 24

 3.4.2 Kesehatan Fisik dan Psikologis 25

 3.4.3 Kekerasan Seksual 26

 3.5 Ketersediaan Jaminan Keamanan Dalam Liputan Berisiko 29

 3.5.1 Protokol Keamanan 29

 3.5.2 Kontrak Kerja 31

 3.5.3 Fasilitas Liputan 31

Temuan Riset Journalist Safety Index 34

Referensi 37

DAFTAR GRAFIS

Sebaran Responden Berdasarkan Gender.....	14
Sebaran Responden Berdasarkan Pulau	15
Sebaran Responden Berdasarkan Gender di Jakarta	16
Sebaran Responden Kategori Liputan Berisiko di Jakarta	18
Sebaran Responden Kategori Liputan Berisiko di Luar Jakarta	19
Sebaran Responden Kategori Liputan Berisiko di Jakarta	23
Sebaran Responden Kategori Liputan Berisiko di Luar Jakarta	24
Pengetahuan dan Ketaatan Protokol Persiapan Peliputan Berisiko di Jakarta	28
Pengetahuan dan Ketaatan Protokol Persiapan Peliputan Berisiko di Luar Jakarta	28
Pengetahuan dan Ketaatan Protokol Persiapan Peliputan Berisiko di Jakarta	30
Pengetahuan dan Ketaatan Protokol Persiapan Peliputan Berisiko di Luar Jakarta	30
Foto Aksi Nurhadi	32
Poster Aksi Nurhadi	33

KATA PENGANTAR AJI

Definisikan Keamanan Anda dan Lakukan Upaya Penyelamatan.

Indeks Keselamatan Jurnalis 2022 merupakan gambaran tentang keamanan jurnalis di berbagai wilayah Indonesia. Indikator keselamatan tersebut setidaknya dapat dilihat dari sejumlah indikator keamanan fisik, kesehatan mental, keamanan digital, hingga keamanan hukum. Keempat indikator keamanan ini apabila disiapkan dengan matang, setidaknya dapat mengurangi dampak atau bahkan terhindar dari serangan.

Sayangnya tidak semua jurnalis memiliki pengetahuan yang cukup tentang keamanan dan tidak banyak perusahaan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja mereka. Akibatnya dampak serangan terhadap jurnalis semakin berlapis dan berat dirasakan korban. Karena itu, AJI sebagai organisasi profesi berkepentingan membuat Indeks Keselamatan Jurnalis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan.

Indeks Keselamatan Jurnalis 2022 merupakan indeks kali pertama yang dibuat AJI. Tentu masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam penyusunannya. Namun, Indeks Keselamatan Jurnalis ini setidaknya dapat memberi gambaran tentang kondisi jurnalis di berbagai daerah.

Indeks Keselamatan Jurnalis 2022 ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi komunitas pers yakni jurnalis, perusahaan pers, dan Dewan Pers, serta pemerintah untuk memastikan keselamatan jurnalis semakin baik. Sebagai contoh dengan memastikan pemberian alat pelindung diri bagi jurnalis agar aman dalam bekerja.

Namun, upaya pencegahan kekerasan terhadap jurnalis harus berjalan bersama dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Aparat penegak hukum harus memproses pelaku-pelaku kekerasan yang masih berkeliaran di masyarakat. Tanpa ini semua, maka upaya pencegahan kekerasan dari komunitas pers akan pincang dan kekerasan terhadap jurnalis tetap berjalan. Artinya keselamatan jurnalis yang diimpikan akan lebih sulit terwujud.

Terakhir, AJI Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan USAID dan Internews sehingga riset ini bisa terlaksana. Kita meyakini kerja sama luar biasa ini akan terus berlanjut pada masa mendatang. Termasuk dalam penyusunan Indeks Keselamatan Jurnalis pada tahun mendatang agar bisa menjadi bahan kajian yang mumpuni untuk pers Indonesia yang lebih baik.

Selamat membaca.

Sasmito

Ketua Umum AJI Indonesia

KATA PENGANTAR INTERNEWS

Keselamatan jurnalis masih menjadi persoalan besar di Indonesia hingga saat ini. Dalam catatan AJI maupun LBH Pers, dalam tiga tahun belakangan, pekerjaan jurnalis menjadi semakin berisiko mendapatkan gangguan kekerasan, baik secara digital maupun fisik. Ini akan membuat kerja pers, salah satu pilar demokrasi, akan terhalangi. Akses masyarakat pada informasi juga bisa turut mengalami penurunan kualitas.

Maka dari itu, Internews melalui program Media Empowerment for Democratic Integrity and Accountability (MEDIA) yang didanai USAID mendukung penerbitan Indeks Keselamatan Jurnalis 2022 yang diprakarsai dan disusun oleh Aliansi Jurnalis Independen. MEDIA bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses informasi yang berkualitas menuju penguatan akuntabilitas demokrasi dan pengurangan risiko konflik.

Dengan demikian, penerbitan ini sangat sejalan dengan salah satu sasaran MEDIA yakni meningkatkan kemampuan jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis untuk dalam mencegah dan mengelola ancaman dan risiko, baik fisik maupun digital. Diharapkan indeks keselamatan media ini akan menyumbang pada upaya untuk memberi perlindungan pada hak yang mendasar bagi warga negara untuk mendapatkan informasi dengan baik, seandainya pada jurnalis bisa melakukan pekerjaannya dengan aman.

Indeks Keselamatan Jurnalis ini sendiri mencakup beberapa indikator yaitu kondisi politik dan ekonomi, regulasi terkait kebebasan pers/informasi, dan kekerasan terhadap jurnalis baik dari aspek fisik, digital, hukum dan psikologi. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan jurnalis merupakan sesuatu yang kompleks, tidak hanya berupa kekerasan di lapangan pada saat meliput – hal yang masih saja tinggi di Indonesia – tetapi juga persoalan-persoalan struktural dan kesejahteraan yang ikut menentukan keselamatan kerja. Ini merupakan sumbangan penting dari AJI dalam perkembangan jurnalisisme saat ini.

Semoga publikasi ini bisa menjadi patokan penting lainnya hasil dari kemitraan Internews dengan AJI Indonesia yang telah berlangsung selama lebih 2 dekade ini. Besar harapan kami bahwa indeks ini tidak hanya berhenti sebagai kajian, tetapi akan menjadi patokan ukuran ke depan dalam melihat bagaimana keselamatan dan keamanan jurnalis diterapkan di Indonesia.

Eric Sasono | MEDIA Chief of Party
Internews Indonesia



Indeks Keselamatan Jurnalis

1. Pengantar

Latar Belakang

Jurnalis di Indonesia belum aman dan perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan. Setiap tahun selalu ada jurnalis yang mengalami kekerasan. **Tahun 2021, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat 43 kasus kekerasan terhadap jurnalis.**

Jenis kekerasan yang dialami jurnalis bermacam-macam, di antaranya: kekerasan fisik, pelarangan liputan, ancaman, serangan digital, teror, kekerasan seksual, kriminalisasi hingga pembunuhan. Kekerasan ini sengaja menysar jurnalis dan berpotensi membuat jurnalis mengalami trauma.

Kasus kekerasan fisik paling mutakhir menimpa jurnalis majalah Tempo di Surabaya, Nurhadi, yang sempat disekap ketika meminta konfirmasi (kasus dugaan korupsi) kepada mantan pejabat Direktorat Pajak, Angin Prayitno Aji dalam acara pernikahan anaknya di Gedung Samudra Bumimoro, Surabaya, 27 Maret 2021.

Sedangkan kekerasan digital terhadap jurnalis paling menonjol terjadi pada akhir September 2022. Peretas telah menyerang nomor kontak dan media sosial milik 37 jurnalis dan eks pekerja Narasi. Selain itu website media ini juga mengalami serangan DDOS (Distributed Denial of Service) atau penolakan layanan secara terdistribusi dan dikirim pesan berupa ancaman, "Diam atau mati."

Kekerasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. **Namun, terkadang kurangnya pengetahuan jurnalis dalam melihat risiko keamanan ikut menyumbang terjadinya kekerasan.** Semisal kurangnya pemahaman tentang liputan berisiko tinggi seperti investigasi akan membawa jurnalis kepada kekerasan jika tidak dimitigasi terlebih dahulu. Atau jurnalis semestinya bisa terhindar dari dampak berat kekerasan fisik jika perusahaan memberikan alat pelindung diri. Tapi sayangnya perusahaan media selama ini masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis.

Setidaknya ada empat sebab utama mengapa jurnalis mengalami kekerasan: Pertama, sistem politik yang tidak memberi jaminan perlindungan keselamatan kepada jurnalis. Kedua, institusi media massa yang abai terhadap para jurnalisnya. Ketiga, jurnalis yang tidak mendapat kesempatan meningkatkan kapasitas dalam hal keselamatan diri saat bekerja. Keempat, masih ada kelompok masyarakat yang tidak paham bahwa jurnalis yang sedang menjalankan profesinya dilindungi Undang-Undang Pers.

Padahal kita tahu, kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya serangan terhadap komunitas pers, tetapi juga serangan terhadap publik. Sebab, jurnalis bekerja untuk memastikan publik mendapat informasi yang valid sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Hak publik untuk mendapatkan informasi ini dijamin konstitusi Indonesia.

AJI sebagai salah satu organisasi profesi jurnalis terus berupaya untuk mengurangi kekerasan secara lebih terarah dan sistematis. Salah satu caranya adalah dengan membuat indeks keselamatan jurnalis. Indeks ini dihitung berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 520 jurnalis di seluruh Indonesia. Survei ini dilengkapi dengan FGD untuk lebih mempertajam hasil temuan di lapangan. Indeks ini memberikan gambaran detail kondisi yang dialami dan dihadapi jurnalis sehingga dapat menjadi panduan dalam melakukan perbaikan situasi.

Maksud dan Tujuan

Indeks keselamatan jurnalis ini memiliki tujuan untuk:

- Mendapatkan gambaran tentang keamanan jurnalis di Indonesia
- Sebagai bahan advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis dan kebijakan terkait keselamatan jurnalis
- Sebagai bahan masukan terhadap perusahaan media untuk menjamin keselamatan jurnalis

2. Metodologi

Laporan indeks keamanan jurnalis ini disusun dengan metode penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif. Desain pendekatan campuran yang digunakan adalah *explanatory design*.

Penelitian kuantitatif melibatkan **522 responden yang tersebar di seluruh Indonesia**. Terbagi dalam dua kelompok yaitu **120 jurnalis di Jakarta** dan **402 jurnalis di luar Jakarta**. Seluruh responden adalah anggota AJI. Jumlah responden adalah 28% dari jumlah total anggota AJI yang mencapai 1.833 orang. Adapun periode survei 16 Juni - 15 Juli 2022

Berdasarkan gender, proporsi responden terdiri dari **74 laki-laki dan 46 perempuan di Jakarta**. Sementara **279 laki-laki dan 123 perempuan** di luar Jakarta. Di Jakarta, proporsi anggota perempuan berjumlah 30% dan laki-laki 70%, sedangkan di luar Jakarta, anggota perempuan sebesar 17% dan laki-laki 83%.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang merupakan operasionalisasi **variabel pertama yaitu aspek protokol keamanan dalam liputan berisiko**. Dimensi yang ditanyakan meliputi pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan, dengan subdimensi meliputi keamanan digital, fisik, psikologis, dan kekerasan seksual.

Sedangkan **variabel kedua adalah aspek ketersediaan atau jaminan keamanan yang diberikan media tempat responden bekerja**. Dimensi yang ditanyakan meliputi protokol keamanan, kontrak kerja yang memperhatikan aspek keamanan, fasilitas keamanan (alat kerja dan pelatihan), serta asuransi.

Menurut *Reporters Sans Frontières* (RSF) yang dimaksud dengan **liputan berisiko tinggi adalah liputan di suatu wilayah di mana jurnalis sangat berpotensi mengalami kekerasan fisik jauh di atas situasi normal**. Akibatnya jurnalis bisa terluka, sakit yang serius dan bahkan tewas.

Ada tiga kondisi atau situasi yang masuk dalam kategori liputan berisiko tinggi, yaitu:

1. **Hostile environment** atau wilayah yang penuh dengan perseteruan/pemusuhan dan tidak ramah: negara yang dipimpin

diktator, daerah konflik, wilayah yang ada pemberontakannya atau kriminalitas tinggi, daerah dengan cuacanya yang ekstrem, daerah kutub, hutan, dan padang pasir;

2. **Dangerous event** atau peristiwa yang membahayakan: aksi demonstrasi dengan kekerasan, pemberontakan, serangan teroris, kecelakaan nuklir, kimia, dan biologi, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai) dan pandemik;
3. **High-risk activities** atau aktivitas berisiko tinggi: investigasi ke wilayah yang dikuasai teroris, mafia atau ekstremis baik yang terbuka maupun tertutup.

Jawaban responden dituangkan dalam skala yang nilainya adalah 1=sangat buruk, 2=buruk, 3=biasa, 4=baik, dan 5=sangat baik.

Selanjutnya jawaban responden diberi bobot. Yang pertama, aspek protokol keamanan bobotnya 40% dengan tiga dimensi masing-masing kesadaran 10%, pengetahuan 10%, dan ketaatan 20%.

Sedangkan aspek ketersediaan jaminan keamanan yang diberikan media tempat responden bekerja bobotnya 60% yang terdiri dari dimensi protokol keamanan 15%, kontrak kerja yang memperhatikan aspek keamanan 15%, fasilitas keamanan (peralatan penunjang keamanan dan pelatihan keamanan) 15%, dan asuransi 15%.

Penghitungan skor akhir indeks dijalankan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah menghitung skor indeks per dimensi. Tahap selanjutnya, menghitung skor akhir indeks dengan cara menjumlahkan skor indeks per dimensi. Rinciannya:

- Nilai indeks perdimensi (Total Nilai Indikator/Jumlah Indikator) x Bobot
- Indeks akhir = Nilai indeks dimensi (NID) 1 + NID 2 + NID 3 + NID 4

Hasil pembobotan terhadap dua hal ini digabungkan dan hasilnya adalah indeks keselamatan jurnalis.

Selanjutnya, penelitian kualitatif dilaksanakan dengan mengadakan *focus group discussion (FGD)* di Jakarta yang diikuti 13 jurnalis. Dalam FGD ini para jurnalis menjawab pertanyaan yang dilontarkan fasilitator berdasarkan

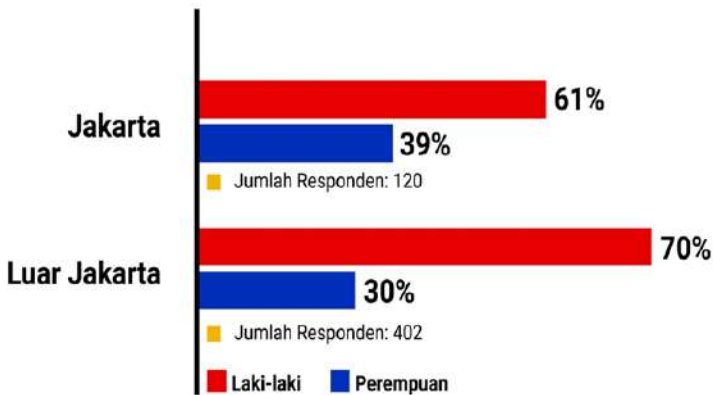
temuan dalam kuisisioner. FGD berfungsi mencari latar atas jawaban responden dalam kuisisionernya atau mencari konteks.

3. Hasil Riset

3.1 Profil Responden

Secara garis besar, jurnalis terbagi menjadi dua, yaitu yang tinggal di Jakarta 120 orang (20%) dan di luar Jakarta, tersebar di berbagai pulau, ada 402 orang (80%). Sedangkan pembagian secara gender adalah laki-laki 353 (68%) dan perempuan 169 (32%). Di Jakarta, pembagiannya adalah 74 laki-laki (61%) dan 46 perempuan (39%) di Jakarta. Di luar Jakarta ada 279 laki-laki (70%) dan 123 perempuan (30%).

Sebaran Responden Berdasarkan Gender



Sebaran Responden Berdasarkan Pulau



■ **BALI dan NUSATENGARA**

Responden: 30
Persentase: 6%

■ **KALIMANTAN**

Responden: 32
Persentase: 6%

■ **KEP. MALUKU**

Responden: 17
Persentase: 3%

■ **PAPUA**

Responden: 12
Persentase: 2%

■ **PULAU JAWA**

Responden: 230
Persentase: 44%

■ **PULAU SULAWESI**

Responden: 57
Persentase: 11%

■ **PULAU SUMATERA**

Responden: 144
Persentase: 28%

Sebaran Responden Berdasarkan Gender di Jakarta



3.2 Pengalaman Liputan Berisiko

Liputan berisiko adalah kegiatan jurnalistik yang dilakukan di tempat yang berpotensi menyebabkan jurnalis rentan mengalami kecelakaan, kekerasan fisik, dan nonfisik. Biasanya hal ini terjadi saat jurnalis meliput di wilayah konflik atau ekstrem seperti wilayah bencana.

Mayoritas jurnalis (85%) pernah melakukan liputan yang berisiko dan sisanya sebanyak 15% menyatakan belum pernah. Di Jakarta, jumlah jurnalis perempuan yang pernah melakukan liputan berisiko mencapai 85%, lebih besar dari jurnalis laki-laki yang hanya 74%. Di luar Jakarta, terjadi sebaliknya. Jumlah jurnalis laki-laki yang pernah melakukan liputan berisiko mencapai 87%, lebih besar dari jurnalis perempuan yang hanya 79%.

Artinya, di Jakarta, jurnalis laki-laki yang belum pernah melakukan liputan berisiko mencapai 26%, lebih besar dari jurnalis perempuan yang hanya 15%. Sedangkan di luar Jakarta, jumlah jurnalis perempuan yang belum

pernah liputan berisiko mencapai 24%, lebih besar dari jurnalis laki-laki yang hanya 13%.

Mayoritas jurnalis yang pernah melakukan liputan berbahaya ini karena jurnalis tidak bisa membatasi kerjanya hanya di wilayah yang aman dan nyaman saja. Tetapi ada kemungkinan lain, mereka “terpaksa” karena tidak bisa menolak atau takut menolak penugasan.

Ketidakmampuan menolak penugasan pada liputan yang berisiko umumnya terjadi pada jurnalis di daerah (kontributor) yang bekerja untuk media nasional. Dalam FGD, seorang jurnalis perempuan di Manado (inisial JH) mengatakan, jika menolak penugasan secara langsung, ia dapat diancam oleh kantor pusat. Untuk menolak secara halus, JH berpura-pura tidak membaca pesan di gawainya yang dikirim redaktur dari kantor pusat. “Kalau saya tak menolak secara langsung, tapi pura-pura tak baca pesan WA. Pura-pura gila kalau kata orang Manado,” kata JH.

Lain JH lain juga MA, seorang jurnalis media Jakarta yang bertugas di Papua. MA menceritakan cara menghindari risiko kerja saat diminta oleh redaksi Jakarta meliput ke daerah Keerom, Papua. “Emang enak sekali seperti kita naik naik apa taksi, naik motor sampai ke Keerom perlu waktu 2 jam. Akhirnya ya sudah, pura-pura gila saja HP tinggal atau SMS-nya nanti sampai malam ditanya lagi waduh bang ini saya liputan nggak tahu saya,” kata MA.

Fenomena berbeda terjadi di Jakarta, karena jurnalis memiliki keleluasaan untuk menolak penugasan yang dinilai memiliki risiko keamanan yang tinggi. Atau bahkan dalam proses penunjukkan liputan investigatif, redaktur atau Pemimpin Redaksi meminta jurnalis mengajukan diri.

“Iya kalau di tempat saya sih biasanya Mas, kalau kategorinya kaya liputan investigatif biasanya kita lelang tuh, kita diskusi sama teman-teman di kalangan redaktur dulu. Siapa yang mau ditunjuk berapa calonnya, nanti dipanggil reporternya, mau nggak. Kalau mereka tak siap ya kita ganti gitu,” kata RG, seorang editor media online di Jakarta.

Perlakuan di Jakarta memang berbeda dengan jurnalis di daerah yang hubungan industrialnya tidak jelas. “Jurnalis organik” istilah di Jakarta, mendapat aspek preventif keamanan hingga asuransi. Meski hal itu berlaku di beberapa media saja.

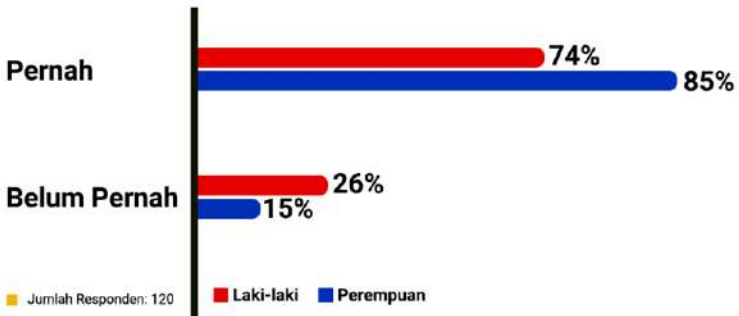
Kesaksian RG berbeda dengan pengakuan IDH, jurnalis daerah yang biasa meliput di Nusa Tenggara Barat. Bahkan saat kekerasan menimpa dirinya, pun tuntutan hukum, kantor yang selama ini menerbitkan karyanya tak memberi bantuan. “Umumnya jurnalis tidak mendapat pendampingan hukum dari kantor,” kata IDH.

Ia mengatakan, **satu-satunya cara memperoleh bantuan ketika mendapat gugatan hukum, adalah mengadu ke organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) setempat.** “Kalau ada kasus ya ngadunya ke AJI. Kalau dari kantor tak pernah, paling editor mengarahkan jangan liputan jika kondisinya rawan,” katanya. Kebanyakan jurnalis justru disarankan oleh kantor untuk menghubungi LBH Pers ataupun AJI di kota masing-masing. Sehingga Ketika muncul tuntutan hukum, jurnalis secara swadaya mencari bantuan yang tersedia dalam ekosistem eksternal (AJI atau LBH Pers).

Hasil survei menyatakan 90% jurnalis laki-laki dan 96% jurnalis perempuan di luar Jakarta mengatakan bisa menolak penugasan. Angka ini lebih besar dari jurnalis di Jakarta di mana 85% jurnalis laki-laki dan 89% jurnalis perempuan yang menyatakan tidak bisa menolak.

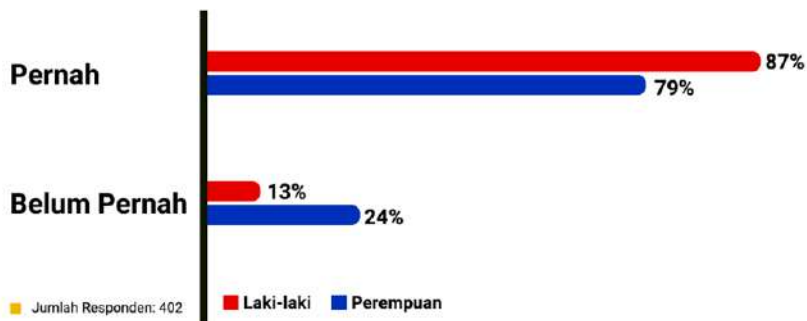
Sebaran Responden Kategori Liputan Berisiko di Jakarta

*Apakah anda pernah melakukan liputan berisiko?



Sebaran Responden Kategori Liputan Berisiko di Luar Jakarta

*Apakah anda pernah melakukan liputan berisiko?



3.3 Jenis Liputan Berisiko

Dari berbagai liputan yang berisiko, **mayoritas jurnalis di Jakarta dan di luar Jakarta menyatakan liputan di wilayah konflik militer dan maupun konflik antarmasyarakat adalah liputan paling berisiko (90%)**. Selanjutnya adalah di wilayah yang mungkin diduduki atau dikuasai kelompok bersenjata (74%), wilayah dengan risiko penularan penyakit (72%), liputan aksi teroris (62%), liputan di wilayah bencana alam (58%), dan yang paling tidak berbahaya adalah liputan kriminal (21%).

Liputan kriminal dianggap paling tidak berbahaya kemungkinan besar karena “tradisi” jurnalis meliput di kantor polisi yang jelas aman. Atau kemungkinan lain, meliput suatu kasus kriminal bersama polisi. Bila jurnalis melakukan sendiri dan datang di lokasi yang tinggi angka kriminalnya, boleh jadi menjadi liputan yang berbahaya.

Mayoritas responden (85%) mengatakan mereka pernah melakukan liputan berisiko. Dalam FGD, beberapa jurnalis mengakui bagaimana mereka mengalami kekerasan saat melakukan liputan berisiko. Salah satu jurnalis

yang pernah mengalami itu adalah SS, seorang perempuan jurnalis dari media asing yang tinggal di Jakarta. Waktu itu, ia meliput peristiwa bentrokan antara mahasiswa Sekolah Teologi SETIA di Jakarta Timur dengan warga antara tahun 2008 atau 2010.

“Saya ke sana dengan jurnalis dari Belanda, dia perempuan. Kami diintimidasi sama warga setempat, kami didorong ke suatu gang yang saya pikir, kita disuruh tunggu di situ, artinya kita ngga bisa meliput kejadian itu,” ujarnya.

Dalam FGD, para jurnalis mengatakan ancaman kekerasan digital makin meningkat. Beberapa tahun terakhir, catatan tentang kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia yang dilakukan AJI Indonesia, kekerasan digital terhadap jurnalis selalu ada. AJI mencatat selama dalam periode Mei 2020 hingga Mei 2021 ada 14 kasus serangan digital.

Sedangkan pada September hingga Oktober 2022, serangan digital menimpa 37 awak redaksi dan eks pekerja Narasi TV yang terjadi setelah media massa itu mengkritik korupsi di tubuh polisi. Pelaku juga meretas situs Narasi TV dan mengirimkan pesan, “Diam atau mati.”

Salah satu bentuk kekerasan digital yang menimpa jurnalis adalah *doxing*, yaitu menyebarkan identitas lengkap jurnalis di media sosial. Nama jurnalis yang tertulis lengkap dalam berita yang dibuatnya, memudahkan orang yang tidak suka untuk melakukan *doxing*.

Doxing adalah pintu masuk bagi perundungan dan kekerasan fisik. Berbekal informasi di media sosial, pelaku dapat mengidentifikasi jurnalis dan melakukan kekerasan fisik. Tak hanya jurnalis yang menjadi target sasaran, keluarga pun dapat terbawa.

Praktik *doxing* dapat menimpa jurnalis tanpa harus meliput suatu isu di wilayah berisiko. Cukup menulis isu yang sensitif, ia bisa menjadi sasaran *doxing* oleh orang atau kelompok yang tidak suka dengan liputan itu. **“Yang paling mengancam itu sebenarnya hal-hal seperti *doxing*. Bukan hanya pada jurnalisnya, kadang keluarganya juga ikut diumbar, jadi berpotensi bahkan ke kekerasan fisik,”** ujar AP, seorang jurnalis yang menjabat produser di salah satu stasiun televisi di Jakarta.

Seorang jurnalis berinisial PE, penyintas serangan digital, mengisahkan pengalamannya bersama koleganya saat menghadapi serangan digital dalam bentuk *doxing* usai melaporkan berita dari daerah. **“Ada orang yang tak setuju tentang pemberitaan itu jadi aku dibully, disumpah-sumpahin atau pernah juga sampai anak-anak aku juga ikut-ikutan disumpahin oleh netizen,”** ujar PE.

Kejadian itu membuat PE trauma. Apalagi teror dilakukan di media sosial, meski hanya verbal, tak langsung secara fisik, namun sangat mengganggu. “Sampai sekarang jika bikin berita soal itu tak berani,” ujar PE yang berdomisili di Bengkulu dan bekerja di sebuah media nasional.

Kerentanan jurnalis terhadap serangan digital antara lain akibat praktik media yang menulis nama lengkap jurnalis sebagai *byline* pemberitaan. Hal ini memudahkan pelaku kejahatan melacak jejak digital jurnalis dan kemudian mengintimidasi atau melakukan kekerasan.

RZ, seorang jurnalis media cetak di Jakarta saat FGD pada bulan Juli dan Agustus 2022 lalu mengakui, ancaman *doxing* menjadi permasalahan jurnalis di Jakarta dan sekitarnya, meski tak menutup kemungkinan kekerasan fisik masih sering terjadi. “Era sekarang mencantumkan nama secara lengkap mudah sekali kita ditracking, itu jadi,” kata RZ.

Kekhawatiran jurnalis dari serangan digital bisa merambah pada serangan fisik. Mereka mengungkap dampak *doxing* tak hanya sebatas penyebaran informasi pribadi, biasanya diikuti oleh tindakan intimidasi disusul oleh serangan fisik.

Temuan itu menandai ancaman fisik sesungguhnya masih menjadi kekhawatiran utama jurnalis. **Mayoritas informan FGD mengakui pernah mengalami kekerasan fisik seperti intimidasi, didorong, perampasan paksa alat kerja seperti telepon seluler dan lain-lain.** “Pernah pada saat wawancara tiba-tiba ada polisi yang narik aku dari belakang sampai mau jatuh gitu sambil dia bilang ini provokator ini provokator,” kata JAN, seorang jurnalis media nasional untuk daerah liputan di Semarang. Padahal, kata JAN, ia sedang wawancara dengan korlap pendemo. “Tiba-tiba ada yang narik sambil bilang provokator. Aku juga kepancing emosi jadi sempat maki-maki polisi juga,” kata JAN menambahkan.

Pengalaman kekerasan saat liputan juga dirasakan oleh NS, seorang perempuan, yang bekerja sebagai editor media cetak di Jakarta. Ia mengaku pernah didorong saat liputan di kantor Bank Indonesia. “Dulu saat liputan *doorstop* dulu zaman Agus Marto DW,” kata NS. Namun saat wawancara *doorstop*, dia dihalangi dan didorong lalu diminta menemui Humasnya.

Sedangkan SS, Jurnalis media asing di Jakarta mengalami intimidasi saat liputan kerusuhan mahasiswa sekolah teologi dengan warga di Jakarta Timur. “Oleh warga setempat kami didorong ke gang sehingga tak mampu meliput kejadian,” kata SS. Saat itu dia masih bisa telepon kantor, namun disuruh menunggu. “Artinya kita tak bisa liput kejadian itu,” katanya.

Sejumlah kesaksian jurnalis menunjukkan **ancaman serangan digital merupakan fenomena yang lebih banyak terjadi di Jakarta dan kota-kota besar** lainnya. Sedangkan **di daerah, kekerasan fisik lebih dominan**. Di sejumlah pelosok daerah, pelaku tak melakukan *doxing* di media sosial, namun langsung memburu dan menyandera jurnalis saat meliput konflik.

Di Kabupaten Serang dan Lebak, Provinsi Banten, ada jurnalis ditahan oleh beberapa orang dekat Bupati. “Ancaman-ancaman seperti itu masih banyak di daerah-daerah terutama di daerah-daerah banyak kasus korupsi dan konflik agraria,” kata RG, seorang editor media *online* di Jakarta.

Karakter ancaman kekerasan saat liputan di daerah berbeda-beda. Di perkotaan seperti di Jakarta dan kota-kota besar sering dilakukan dengan *doxing*. “Tapi di daerah-daerah pelosok kekerasan fisik itu masih merajalela,” kata RG menjelaskan.

Perbedaan antara kota besar dan daerah adalah aspek minimnya perhatian publik. Praktik-praktik serangan digital dilakukan di kota besar karena pelaku menilai berisiko jika melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis. Sebab ada banyak jaring pengaman bagi jurnalis di Jakarta seperti organisasi profesi, Lembaga Bantuan Hukum, dan jaringan jurnalis Jakarta yang luas dengan pejabat maupun aktor politik. Di luar Jakarta, ketika jurnalis lokal tidak memiliki keistimewaan seperti di Jakarta, ancaman fisik lebih mudah terjadi.

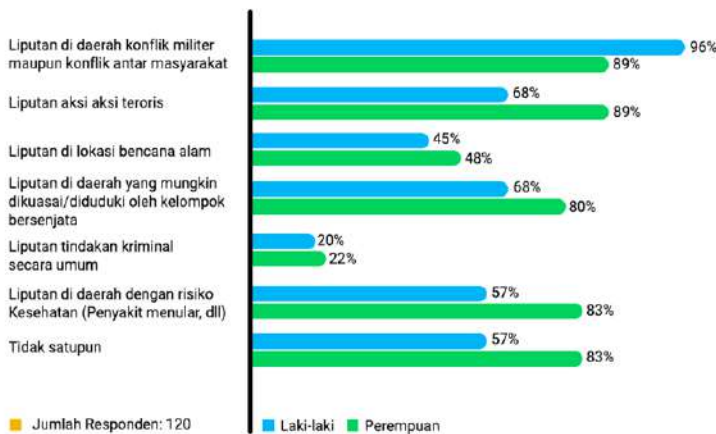
Ancaman ini pun semakin besar ketika topik liputan bersentuhan korupsi pejabat publik dan konflik sosial seperti agama.

AP seorang produser sebuah stasiun televisi di Jakarta mengatakan, ancaman kekerasan semua berkaitan dengan uang, dalam hal ini korupsi atau pelanggaran yang melibatkan aparat. “Papua melibatkan aparat, sawit juga intimidasinya dilakukan beberapa kali oleh aparat. Kasus-kasus lainnya yang berisiko kalau melibatkan sipil dan juga berkaitan dengan uang misalnya kasus-kasus sengketa ormas,” kata AP.

la beruntung belum mengalami ancaman karena lebih banyak bekerja di balik meja redaksi. Tetapi beberapa jurnalisnya di daerah diancam karena liputannya berkaitan dengan uang, keagamaan dan Ormas.

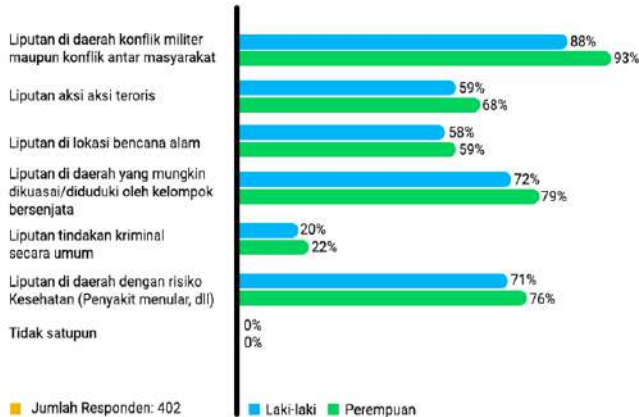
Sebaran Responden Kategori Liputan Berisiko di Jakarta

* Menurut anda, mana diantara pilihan di bawah yang termasuk dalam kategori liputan berisiko (Anda bisa memilih lebih dari satu jawaban)



Sebaran Responden Kategori Liputan Berisiko di Luar Jakarta

* Menurut anda, mana diantara pilihan di bawah yang termasuk dalam kategori liputan berisiko (Anda bisa memilih lebih dari satu jawaban)



3.4. Protokol Keamanan dalam Liputan Berisiko

3.4.1. Keamanan Digital

Hampir seluruh jurnalis bekerja menggunakan telepon seluler, apalagi saat ini era *mobile journalism*. Secara umum hasil survei menunjukkan, jurnalis sudah memiliki pengetahuan yang baik cara mengamankan telepon selulernya. Nilai indeksnya antara 3 dan 4. Namun banyak jurnalis belum memahami pentingnya mencatat 15 angka serial *International Mobile Equipment Identity (IMEI)*. Untuk aspek ini, pengetahuan jurnalis di luar Jakarta lebih baik dari jurnalis di Jakarta.

Setelah ditanyakan apakah mereka menjalankan pengetahuannya (subdimensi ketaatan protokol keamanan digital) ternyata ketaatan mereka untuk mencatat IMEI mendekati buruk baik untuk jurnalis di luar Jakarta dan

di Jakarta. Begitu pula dalam hal pengetahuan pentingnya menandai kartu SIM, kartu memori dan baterai agar tidak dirusak dan ditukar dengan yang baru. Pengetahuan jurnalis di luar Jakarta lebih tinggi dari jurnalis di Jakarta. Subdimensi ketaatan protokol keamanan digital mencatat tidak banyak jurnalis yang benar-benar mempraktikkan pengetahuannya, hanya sekitar 20% baik jurnalis di Jakarta dan di luar Jakarta.

Pengetahuan para jurnalis tentang protokol keamanan data digital sudah cukup baik, rerata indeksnya di atas 3 hingga 4 lebih sedikit. Kehilangan data atau terkena virus bisa menjadi persoalan serius bagi jurnalis. **Tetapi baik jurnalis di Jakarta dan di luar Jakarta memiliki indeks yang rendah mengenai perlunya memiliki *firewall* untuk melindungi telepon seluler dan komputer mereka.** Untuk ini pengetahuan para jurnalis di luar Jakarta sedikit lebih tinggi dari jurnalis di Jakarta.

Namun dalam aspek konsistensi menggunakan *firewall* kurang dari 50% jurnalis di Jakarta dan di luar Jakarta yang menggunakan *firewall* untuk perangkat mereka. Sedangkan jurnalis di Jakarta kurang dari 50% yang menggunakan jasa surel yang terinskripsi.

Secara umum, nilai indeks pengetahuan responden tentang perlunya menggunakan surel yang terinskripsi, lebih rendah dari nilai indeks pada aspek keamanan data digital lainnya, rata-rata indeksnya 3.5. Sementara indeks jurnalis di luar Jakarta sedikit lebih tinggi dari jurnalis di Jakarta.

3.4.2. Kesehatan Fisik dan Psikologis

Secara umum jurnalis yang menjadi responden sudah sangat memahami tentang persiapan kesehatan fisik yang harus dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Ada 10 item yang ditanyakan dan nilai indeksnya di atas 4. Seperti diketahui indeks 1=sangat buruk, 2=buruk, 3=biasa, 4=baik, dan 5=sangat baik.

Sementara dalam hal persiapan yang berkaitan dengan aspek kesehatan, sejumlah jurnalis masih belum memperhatikan. Pada pertanyaan tentang memastikan golongan darah dan alergi, serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses jika sesuatu terjadi, rerata jawaban antara 3 dan 4, atau antara biasa dan baik.

Hampir seluruh jurnalis yang menjadi responden mempunyai pengetahuan yang bagus bahwa mereka perlu membawa peralatan peralatan *first aid* atau pertolongan pertama setiap kali menuju liputan yang berisiko. Semua jurnalis memiliki nilai sedikit di atas 4, tetapi untuk jurnalis laki-laki di Jakarta, indeksnya sedikit di bawah 4.

Tetapi faktanya, di Jakarta hanya 53 dari 120 jurnalis atau hanya 44% yang mengaku membawa peralatan *first aid*. Sedangkan bagi jurnalis di luar Jakarta, hanya 153 dari 402 atau hanya 38% yang membawa peralatan *first aid*. Peralatan *first aid* sangat penting karena bila jurnalis mengalami cedera di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan, ia atau temannya bisa segera melakukan pertolongan yang dapat menyelamatkan nyawa.

Dari hasil survei, para jurnalis mempunyai pengetahuan baik bahwa mereka perlu mempersiapkan mental dan mengetahui dampak psikologis dari liputan di wilayah berisiko. Nilai indeksnya rata-rata adalah 4.

Hanya saja, ada nilai yang rendah yaitu aspek pentingnya olah raga untuk menyiapkan kebugaran tubuh sebelum terjun ke wilayah yang berisiko. Ini terjadi pada jurnalis di luar Jakarta baik perempuan dan laki dengan indeks rata-rata 3,92.

Nilai rendah juga nampak dalam aspek tentang pentingnya menghabiskan waktu dengan keluarga sebelum bertugas di wilayah berisiko. Indeks 3,7 untuk jurnalis perempuan di Jakarta dan 3,91 untuk jurnalis baik laki dan perempuan di luar Jakarta.

Aspek pengaturan keuangan keluarga dan orang rumah mengetahui akses asuransi kesehatan atau jiwa, juga ada yang rendah. Untuk jurnalis perempuan di Jakarta indeksnya 3,78 dan jurnalis laki-laki di luar Jakarta indeksnya 3,98.

3.4.3. Kekerasan Seksual

Seluruh jurnalis boleh dikatakan memiliki pengetahuan cukup baik bahwa kekerasan seksual bisa menimpa jurnalis saat bekerja atau di mana saja, bagaimana harus bersikap kepada penyintas, dan dalam kondisi seperti apa hal itu dapat terjadi.

Namun responden tidak menganggap kekerasan seksual dapat terjadi kepada jurnalis laki-laki. Boleh jadi ini adalah dampak dari budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki.

Dalam FGD, para perempuan jurnalis mengakui kekerasan seksual adalah ancaman nyata yang mereka dapatkan saat bekerja. Ancaman kekerasan seksual tidak hanya muncul dalam liputan berisiko tetapi juga dalam liputan sehari-hari. Misalnya, kekerasan seksual yang bersifat verbal saat mereka melakukan wawancara.

“Banyak pelaku tidak menganggap itu adalah kekerasan seksual. Padahal itu masuk kekerasan seksual...yang bisa bikin mental jatuh apalagi ketika diucapkan di hadapan banyak orang. Dipikir ah itu bercanda, padahal itu melukai perasaan reporter perempuan, kalau saya sih seperti itu,” ujar seorang jurnalis perempuan dari Samarinda.

Temuan menarik lainnya adalah pendapat responden di luar Jakarta tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. **Ada 89 responden berpendapat memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan bukan bentuk kekerasan seksual. Sedangkan 97 jurnalis laki-laki menyatakan melontarkan pernyataan bersubstansi seksual kepada orang lain bukan bentuk kekerasan seksual.**

Jurnalis laki-laki di Jakarta juga ada yang berpendapat demikian. Namun jumlahnya relatif kecil. Pendidikan kekerasan seksual nampaknya juga perlu menjadi perhatian organisasi profesi, terutama untuk para jurnalis di luar Jakarta.

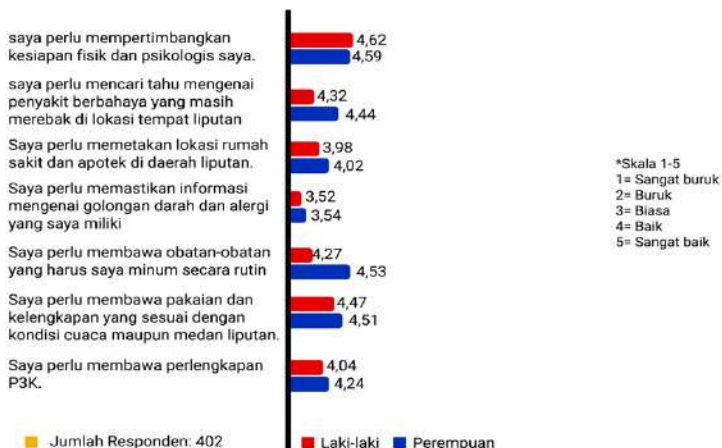
Pengetahuan dan Ketaatan Protokol Persiapan Peliputan Berisiko di Jakarta

Persiapan Aspek Kesehatan Fisik



Pengetahuan dan Ketaatan Protokol Persiapan Peliputan Berisiko di luar Jakarta

Persiapan Aspek Kesehatan Fisik



3.5. Ketersediaan Jaminan Keamanan Dalam Liputan Berisiko

3.5.1. Protokol Keamanan

Keberadaan protokol keselamatan di tempat kerja sangat membantu menciptakan rasa aman bagi jurnalis dalam bekerja. **Lebih dari 50% jurnalis di Jakarta dan di luar Jakarta mengatakan kontrak kerjanya mencakup soal jaminan perlindungan keamanan.**

Namun demikian jurnalis di luar Jakarta menyatakan media tempatnya bekerja, relatif buruk dalam soal pemberian asuransi. Kemungkinan besar karena banyak media di luar Jakarta yang jaminan kesejahteraannya kurang bagus. Sedangkan kondisi media di Jakarta mendapat penilaian yang lebih bagus.

Mayoritas responden mengatakan mereka dapat menolak penugasan dari mediana jika dirasa memiliki risiko keamanan yang tinggi. Menurut survei, jurnalis di luar Jakarta memiliki sedikit lebih banyak kemungkinan untuk menolak penugasan dibanding jurnalis di Jakarta.

Dalam hal media tempat bekerja memberikan dukungan keamanan, seperti bekerja sama dengan aparat keamanan saat jurnalisnya melakukan liputan di wilayah yang berisiko, sejumlah responden mengindikasikan bahwa media tidak melakukan hal tersebut. Tradisi kerja sama seperti ini belum lazim dilakukan media di Indonesia.

Hampir seluruh responden mengatakan media tempat mereka bekerja tidak menyediakan protokol keamanan khusus bagi jurnalis perempuan saat melakukan liputan berisiko. Padahal ini sangat diperlukan karena ada banyak kasus jurnalis perempuan yang mengalami pelecehan seksual.

Pengetahuan dan Ketaatan Protokol Persiapan Peliputan Berisiko di Jakarta

Persiapan Aspek Kesehatan Psikologis



Pengetahuan dan Ketaatan Protokol Persiapan Peliputan Berisiko di Luar Jakarta

Persiapan Aspek Kesehatan Psikologis



3.5.2. Kontrak Kerja

Kontrak kerja adalah dokumen persetujuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan pekerja (jurnalis) dengan pihak perusahaan dalam aspek hubungan kerja. Mengingat profesi jurnalis memiliki risiko kerja yang tinggi, kontrak kerja sudah seharusnya juga memberikan aspek perlindungan keselamatan atau keamanan kepada para jurnalis.

Perlindungan keamanan ini akan membantu memberikan rasa aman kepada para jurnalis saat sedang bekerja. Dalam aspek ini, media massa di Jakarta lebih baik dari media massa di daerah-daerah lainnya. **Sebanyak 67% jurnalis di Jakarta menyatakan kontrak kerja mereka juga meliputi jaminan perlindungan keamanan sedangkan di luar Jakarta hanya 52%.**

3.5.3. Fasilitas Liputan

Meskipun semua responden mengatakan media tempat mereka bekerja memperhatikan jurnalisnya saat berada di wilayah berisiko, tetapi **penelitian ini menunjukkan semua perusahaan media kurang memperhatikan rasa aman kepada para jurnalis.** Hampir semua responden menilai buruk dalam hal pemberian pelatihan keamanan liputan di wilayah yang berisiko tinggi.

Responden dari luar Jakarta, menilai buruk media tempat mereka bekerja dalam hal memberikan perlengkapan keamanan dan asuransi untuk mengantisipasi dampak dari liputan di wilayah berisiko. Di Jakarta pun tidak semua media memberikan dua hal ini kepada jurnalisnya.

FGD juga mengungkapkan bahwa media tidak memberikan keterampilan keamanan dan tidak memberikan dukungan serius setelah kekerasan terjadi. Kebanyakan jurnalis justru mendapat dukungan dari ekosistem eksternal seperti organisasi profesi AJI, Dewan Pers, dan LBH Pers.

Para peserta FGD mengatakan jika sedang melakukan liputan berisiko, pihak kantor hanya melakukan pemantauan saja. Ini pun sifatnya kultural karena didorong solidaritas sebagai sesama jurnalis atau antara jurnalis dengan editor dan redaktur. “Sebenarnya tak dibakukan juga. Ada sistem kontrol kawan jaga kawan gitu lah.

Misalnya reporter sudah di mana, berapa lama biasanya lapor ke redaktornya,” kata RG, Editor media online di Jakarta.

Sikap abai perusahaan media juga terjadi pada penguatan kapasitas atau pelatihan-pelatihan keamanan jurnalis. **Kebanyakan jurnalis justru mendapatkan pemahaman keamanan dirinya dari organisasi profesi.** Hanya ada satu informan mengaku mendapatkan pelatihan keamanan digital dari media tempatnya bekerja.



Foto Aksi Nurhadi. Dokumentasi: AJI

“Tepat sebelum pandemi aku sempat ada pelatihan di kantor. Termasuk soal soal kekerasan juga mereka sedang menyusun SOP,” kata JAN, jurnalis media nasional, berdomisili di Semarang. Sayangnya ia sendiri tak tahu. Apakah SOP yang dirancang itu berlaku untuk dirinya yang hanya sebagai seorang koresponden daerah. Sedangkan selama ini perusahaan tempat ia bekerja banyak mengutamakan para pekerja organik di Jakarta. “Soalnya sampai saat ini aku juga belum menerima sosialisasinya juga tapi waktu itu mereka sempat menyusun SOP untuk penanganan kekerasan jurnalis,” kata JAN yang berharap ke depan ada perlindungan untuk pekerja media di daerah.

Aspek lain yang tak disediakan oleh perusahaan media mengenai perlindungan hukum atas pemberitaan hasil investigasi yang berpotensi

menimbulkan sengketa. Para jurnalis menyebut tidak ada tim legal yang didedikasikan oleh perusahaan untuk membantu redaksi mengulas dari perspektif hukum terhadap konten hasil liputan.



Poster Aksi Nurhadi. Dokumentasi: AJI

Kalau pun ulasan dilakukan, biasanya dilakukan secara mandiri oleh redaktur ataupun editor yang memiliki pengalaman. “Di tempat saya bekerja Pemred dan redaktur eksekutif itu dianggap sudah punya pengetahuan dasar untuk beberapa naskah atau beberapa itu kata-kata yang berpotensi mendapat gugatan hukum,” kata IR, seorang jurnalis media cetak di Jakarta.

Menurut IR, Pemred dan dan redaktur eksekutif yang bertanggung jawab menentukan detail narasi tulisan, termasuk pilihan kata atau kalimat yang layak diterbitkan. Meski pernyataan IR itu juga diakui tak berlaku bagi semua media.

Redaksi rata-rata memberikan tanggung jawab pada redaktur ataupun editor untuk memperhatikan aspek hukum dari pemberitaan. Mayoritas informan mengatakan tindakan preventif semacam itu tidak dilakukan di media tempat mereka bekerja.

Untuk menghadapi kemungkinan gugatan hukum akibat berita, seperti berita investigatif, kantor media juga tidak menyediakan ahli hukum yang dapat menilainya. Ulasan atau *review* hanya dilakukan oleh editor yang berpengalaman.

Temuan Riset Journalist Safety Index

1. Secara umum pengetahuan jurnalis mengenai risiko keamanan fisik, digital, psikologis, maupun kekerasan seksual sangat baik. Hal ini ditandai antara lain dengan index rata-rata pemahaman yang berkisar 3-4 untuk tiap dimensi.
2. Meski pengetahuan jurnalis mengenai protokol keamanan cukup tinggi, tetapi ketaatannya bervariasi. Misalnya dalam persiapan liputan berisiko, jurnalis menganggap sangat perlu memiliki penghubung di lapangan sebelum melakukan liputan. Tetapi penerapannya hanya 48% jurnalis di Jakarta dan 57% jurnalis di luar Jakarta yang pernah melakukannya.

Begitu juga dengan protokol keamanan data. Mayoritas jurnalis tahu pentingnya menggunakan jasa layanan surel terenkripsi untuk melindungi data dari serangan digital. Namun hanya 43% jurnalis di Jakarta dan 51% jurnalis di luar Jakarta yang menerapkannya.

3. Riset ini juga menemukan mayoritas jurnalis memahami dengan baik aspek-aspek kekerasan seksual kecuali pada beberapa indikator. Ketika ditanya bentuk tindakan yang masuk kategori kekerasan seksual, terdapat 29% jurnalis laki-laki di luar Jakarta yang tidak menyebutnya sebagai kekerasan seksual. Begitu pula dengan “memperlihatkan organ vital tanpa persetujuan”, 25%

jurnalisme laki-laki di luar Jakarta tidak menyebutnya sebagai bentuk kekerasan.

- 4. Berbanding terbalik dengan pengetahuan jurnalis mengenai protokol keamanan, dukungan keamanan dari tempat kerja mendapat indeks rendah.** Beberapa indikatornya adalah minim pelatihan keamanan yang diberikan oleh perusahaan media dan minimnya protokol keamanan khusus bagi jurnalis perempuan (untuk melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual). Dalam sesi FGD, jurnalis menyebutkan kebanyakan pelatihan justru mereka dapatkan dari organisasi profesi dari pada perusahaan media tempat mereka bekerja.

Sedangkan, **absennya mekanisme perlindungan khusus bagi perempuan berdampak pada tidak adanya mekanisme yang memadai ketika jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual dan mengalami trauma.** Praktik yang umumnya dilakukan adalah memindahkan tugas jurnalis perempuan bersangkutan agar terhindar dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

- 5. Walaupun tidak memberikan perlindungan keamanan yang bagus kepada jurnalisnya, ada beberapa indikator dari media yang diberi nilai indeks cukup tinggi.** Dua di antaranya adalah **memberikan ruang sehingga jurnalis memiliki “hak menolak bila ditugaskan ke wilayah berisiko” dan “monitoring keselamatan jurnalis di lapangan”.**

Dalam penggalian lebih jauh di sesi FGD, ditemukan apa yang dimaksud dengan bisa menolak penugasan adalah mengabaikan perintah atasan dengan tidak menjawab pesan di telepon seluler atau dalam bahasa mereka “pura-pura gila”. Hal ini terutama terjadi pada jurnalis di luar Jakarta yang status hubungan kerjanya kontrak.

Begitu juga dengan soal “monitoring keselamatan jurnalis”. Upaya memantau keselamatan jurnalis yang tengah melakukan liputan berisiko memang dilakukan namun sifatnya kultural. Jurnalis yang

menjadi informan dalam FGD mengatakan monitoring yang dilakukan bukan mandat kantor yang terlembagakan melainkan bentuk solidaritas sesama jurnalis dan antara jurnalis dengan editor atau redaktur. Seorang informan menyebut solidaritas ini dengan istilah “kawan jaga kawan”.



REFERENSI

Creswell, J. & Plano Clark, V, 2007, Designing and Conducting Mixed Methods Research, Thousand Oaks, Sage: California.

Manan, Abdul, 2018, Panduan Keselamatan dan Keamanan Jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen: Jakarta

Ningtyas, Ika, 2021, Aliansi Jurnalis Independen, Catatan Akhir Tahun 2021: Kekerasan, Kriminalisasi, & Dampak UU Cipta Kerja (Masih) Bayangi Jurnalis Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen: Jakarta.

Reporters Without Borders, 1992, Safety Guide For Journalists, A handbook for reporters in high-risk enviroment, Reporters Without Borders: Paris.

UNESCO, 2015, Journalist's Safety Indicators: national level; based on the UNESCO's Media Development, UNESCO International Programme for Development of Communication: Paris.

9 789793 530611



ISBN 978-979-3530-61-1

The Alliance of Independent Journalists, 2022
St. Tebet Timur Dalam I No. 25, RW.4, East Tebet,
Tebet District, Jakarta 12820
Tel. +62 21 22908458, Fax 3151261
Email: sekretariat@ajjindonesia.or.id
Web: www.ajji.or.id



JOURNALIST SAFETY INDEX 2022

